

**RENCANA KERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
(RENJA - OPD)**

TAHUN ANGGARAN 2023



**DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 telah tersusun.

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi dengan tetap memperhatikan isu-isu Ketahanan Pangan yang berkembang melalui Musyawarah Forum OPD Dinas Ketahanan Pangan Provinsi dan Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat ini diharapkan dapat dijadikan acuan/pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pihak-pihak yang telah ikut berperan aktif sehingga rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat dapat tersusun dengan baik.

Mamuju, Agustus 2023

KEPALA DINAS,

Ir. H. ABD. WARIS BESTARI, M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19651201 199703 1 005

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	9
2.3. Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	10
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan.....	13
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	13
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....	15
3.3. Program dan Kegiatan.....	16
Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan PD.....	17
4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas	17
4.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan.....	18
Bab V Penutup.....	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

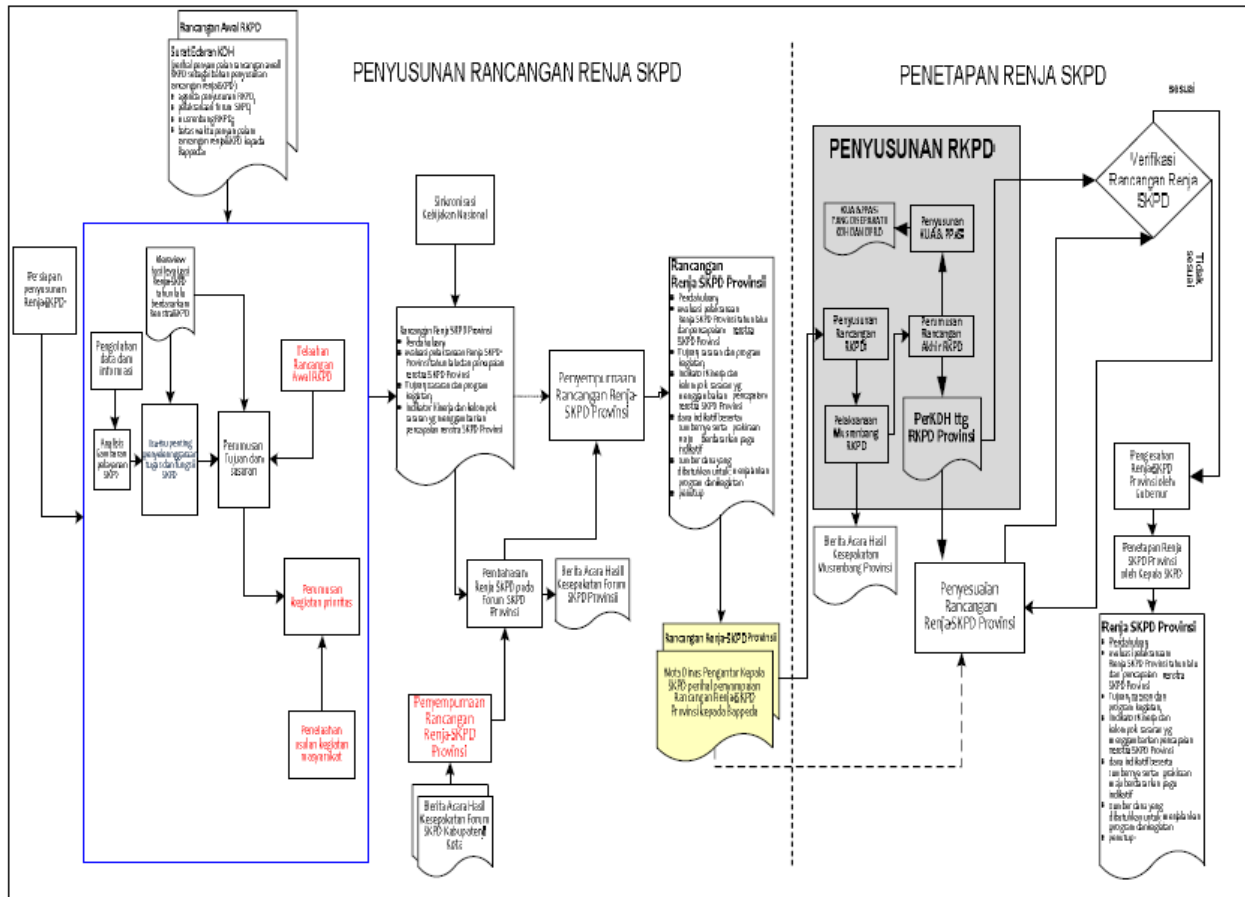
Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas Ketahanan Pangan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, pada tahun 2023 ini merupakan tahun pertama pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya.

Adapun Bagan Alur Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah :

Bagan Alur Tahapan Penyusunan Renja



Proses dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat, berawal dari melakukan evaluasi kinerja Rencana Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat periode sebelumnya (Tahun 2022), keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. Dan membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja untuk tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat.

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026, Dinas Ketahanan Pangan mendukung Tujuan ke-I pada Sasaran Strategis 1 khususnya peningkatan nilai tambah melalui diversifikasi pangan dan mendukung Tujuan ke-II pada Sasaran Strategis 6 khususnya untuk pencegahan stunting, serta dengan melalui Tema dan Prioritas RKPD tahun 2023 Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat yakni ***"Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial"*** Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat dapat mendukung terlaksananya Sasaran dan Kebijakan Strategis Pembangunan Ketahanan Pangan di Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2023 yang menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan Provinsi

Sulawesi Barat yakni sebagai salah satu upaya dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah.

Untuk dapat mewujudkan Sasaran dan Kebijakan Strategis tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat menyusun Rencana Kerja Tahun 2023. Penyusunan Renja SKPD Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun Pertama dari RPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026. Renja SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
3. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi , Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Recana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 51).
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 01 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2014 – 2034
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46.A Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Dan Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Bagian Kedelapan Upt Dinas Ketahanan Pangan Paragraf 1 Uptd Balai Sertifikasi Dan Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan)
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja SKPD disusun dengan maksud dan tujuan adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam

Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023, meliputi :

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
- BAB III TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
- BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU (n-2)

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

A. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan, pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Secara terinci hasil-hasil yang dicapai sampai dengan bulan desember 2021 meliputi :

a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 111.257.000,- Dengan realisasi anggaran APBD Pokok sebesar Rp. 89.550.334,- dan realisasi fisik 100 % keluarannya adalah :

1. Tersedianya Dokumen Perubahan Renstra tahun 2017-2022
2. Tersedianya Dokumen Penyusunan RKA-SKPD, DPA-SKPD, RKA-SKPD Perubahan dan DPA-SKPD Perubahan.
3. Honorarium Pegawai Tidak Tetap 84 OB
4. Makanan & Minuman Yang tersedia (110 Pack)

b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran Rp. 4.306.969.518,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 4,306,882,818,- dan realisasi fisik sebesar 100 % keluarannya adalah :

1. Tersedianya laporan pengelolaan Keuangan semesteran dan laporan keuangan akhir tahun.
2. Blangko SPPD, Blangko SPM, Pengandaan Dokumen, Penjilidan Dokumen (80 Blok)
3. Makanan & Minuman Yang tersedia (35 Pack)

c) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran Rp. 8.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.000.000,- dengan realisasi fisik 100 %. keluarannya adalah :

1. Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
2. Makanan & Minuman Yang tersedia (30 Pack)

d) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran Rp. 300,404,436,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 295,815,671,- dan realisasi fisik sebesar 98.47% keluarannya adalah :

1. Tersedianya Alat tulis kantor (25 Jenis)
2. Tersedianya laptop (2 Unit) dan printer (1 Unit)
3. Makanan & Minuman Yang tersedia (202 Pack)
4. Penggandaan Dokumen, Penjilidan Dokumen (100 Blok)
5. Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dengan instansi Pemerintah, Swasta dan Lembaga terkait lainnya dengan tupoksi Dinas ketahanan pangan (120 Laporan)

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan alokasi anggaran Rp. 9.752.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 9,286,000,- dan realisasi fisik sebesar 95.55 % keluarannya adalah :

1. Tersedianya Kulkas 2 Pintu (2 unit).

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan alokasi anggaran Rp. 69,195,000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 67,114,242,- dan realisasi fisik sebesar 97 % keluarannya adalah :

1. Terlaksananya Surat-menyururat baik Antar Kabupaten Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Barat maupun ke pemerintah pusat
2. Honorarium Pegawai Tidak Tetap 54 OB
3. Tersedianya Alat tulis kantor (3 Jenis)

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan alokasi anggaran Rp. 134,785,300,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 125,205,313,- dan realisasi fisik sebesar 100 % keluarannya adalah :

1. Pajak tahunan mobil jabatan 1 unit, pajak tahunan mobil operasional 2 unit, pajak tahunan motor 8 unit (12 Unit)

9. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Harga dan Harga Pangan, dengan alokasi anggaran Rp. 186,882,600,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 170,973,712,- dan realisasi fisik sebesar 91.49 % keluarannya adalah :

1. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan (6 Kabupaten).
2. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal pada Toko Tani Indonesia selama 1 Tahun.
3. Honorarium Pegawai Tidak Tetap 24 OB

10. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi, dengan alokasi anggaran Rp. 100,000,000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 92,200,650,- dan realisasi fisik sebesar 100 % keluarannya adalah :

1. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (CPP) sebanyak 6 Ton Beras

11. Kegiatan Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dengan alokasi anggaran Rp. 27,911,700,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 27,454,000,- dan realisasi fisik sebesar 100 % keluarannya adalah :

1. Laporan Koordinasi dan Singkronisas Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal (12 Komoditi)

12. Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi, dengan alokasi anggaran Rp. 361,164,600,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 331,348,165,- dan realisasi fisik sebesar 100 % keluarannya adalah :

1. Terlaksananya Survey pola Konsumsi Pangan di 6 kabupaten.
2. Adopsi Tehknologi Sumber Pangan Lokal.
3. Terlaksananya Lahan Pengembangan pangan Pokok Lokal.

13. Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi, dengan alokasi anggaran Rp. 20,530,000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 19,829,840,- dan realisasi fisik sebesar 100 % keluarannya adalah :

1. Tersedianya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 6 Kabupaten dan 1 Provinsi.

14. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi, dengan alokasi anggaran Rp. 696,335,000,- dan realisasi anggaran

sebesar Rp. 677,374,300,- dan realisasi fisik sebesar 100 % keluarannya adalah :

1. Pengadaan bibit tanaman/sayuran dan bibit ternak (36 Kelompok)
2. Pengadaan mesin pengolahan (3 Kelompok)

15. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi, dengan alokasi anggaran Rp. 213,511,000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 167,594,080,- dan realisasi fisik sebesar 100 % keluarannya adalah :

1. Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar
2. Pengadaan Alat Uji Laboratorium dan bahan kimia lainnya
3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

capaian kinerja Dinas ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2021 berdasarkan target indikator kinerja yang sudah ditentukan di gambarkan pada table 2.1

Tabel 2.1

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat daerah	Target	Realisasi
		2021	2021
1	Koefisien Harga Komoditas Pertanian Strategis		
	- Beras Premium	< 5 %	3
	- Beras Medium	< 6 %	3
	- Kedelai Biji Kering	< 9 %	1
	- Daging sapi Murni	< 10 %	5
	- Telur Ayam Ras	< 8 %	4
	- Daging Ayam Ras	< 10%	5
	- Cabai Rawit Merah	< 5 %	2
	- Cabai Rawit Keriting	< 7 %	3
	- Bawang Merah	< 9 %	5
	- Bawang Putih	< 5 %	3
	- Gula Pasir Lokal	< 6 %	4
	- Minyak Goreng dan terigu	< 3 %	1
2	Data/Informasi cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan provinsi, kabupaten dan desa	79,000	12828

3	Persentase Ketersediaan Data Harga Pangan Lokal	10	10> HPP
4	Skor Pola Pangan Harapan / PPH	77.7	74.6
5	Tingkat Konsumsi Energi terhadap Standar Konsumsi Energi	97.5	99.7
6	Persentase Berkurangnya Daerah rawan Pangan	5	3
7	Jumlah Kasus Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Membahayakan Manusia	5	0

2.3 Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam upaya melanjutkan pembangunan ketahanan pangan yang mengarah pada kemandirian pangan, masih banyak permasalahan yang dihadapi, baik dalam aspek: ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, penyediaan cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, penanganan keamanan pangan, kelembagaan ketahanan pangan, maupun manajemen ketahanan pangan. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian tabel berikut :

Tabel 2.2

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kurangya Akses Pangan Masyarakat	Pangan Belum terdistribusikan dengan baik	Belum ada data distribusi pangan yang menyeluruh
			Belum ada regulasi distribusi pangan
			belumada/optimalnya Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat
2	Belum optimalnya konsumsi energi dan protein	Terbatasnya penganekaragaman atau diversifikasi pangan	Kurangya pengetahuan masyarakat tentang konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA)
			Rendahnya pendapatan masyarakat

masyarakat secara seimbang		Masih sedikit pangan olahan lokal yang berkualitas dan berdaya saing
	Masih terdapatnya Daerah Rawan Pangan	Belum Optimalnya Penanganan Kerawanan Pangan.
		Kurang optimalnya koordinasi lintas sektor yang terkait.
		Kurangnya pemahaman dan partisipasi Pemerintah Daerah, Stakeholder dan masyarakat mengenai pentingnya Penyediaan Cadangan Pangan pemerintah Daerah
	Belum Optimalnya Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Kurangnya Kesadaran pelaku usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) untuk melakukan sertifikasi dan registrasi PSAT
	Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat tentang Keamanan Pangan	Belum tersedianya Sarana dan Prasarana pendukung Keamanan Pangan (Laboratorium)
Belum Optimalnya Pengawasan Keamanan Pangan Segar dan Bermutu	Kurangnya petugas pengawas keamanan pangan yang bersertifikat	

Permasalahan yang dihadapi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat dalam mewujudkan tujuan Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas sumberdaya manusia masyarakat Provinsi Sulawesi Barat adalah belum optimalnya kualitas konsumsi pangan masyarakat yang terlihat dari skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang belum mencapai angka 100. Skor PPH belum tentu menunjukkan kurangnya konsumsi energi dan protein masyarakat, namun menggambarkan pola konsumsi yang tidak seimbang atau masih terdapat kelompok pangan yang belum memenuhi standar gizi yang telah ditentukan.

Terdapat beberapa permasalahan pokok Dinas Ketahanan Pangan meliputi belum optimalnya konsumsi energi dan protein masyarakat Provinsi Sulawesi Barat secara seimbang. permasalahan pokok tersebut, disebabkan oleh :

1. Pangan Belum terdistribusikan dengan baik, akar dari permasalahan ini dikarenakan belum ada data distribusi pangan secara menyeluruh, belum

ada regulasi distribusi pangan, dan belum ada/ optimalnya Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat.

2. Terbatasnya penganekaragaman atau diversifikasi pangan, akar dari permasalahan ini Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA), Rendahnya pendapatan masyarakat dan Masih sedikit pangan olahan lokal yang berkualitas dan berdaya saing.
3. Masih terdapatnya Daerah Rawan Pangan, sesuai dengan hasil pemetaan dari Bidang Ketersediaan, Sumber Daya dan Kerawanan Pangan. Dan akar dari permasalahan tersebut dikarenakan belum Optimalnya Penanganan Kerawanan Pangan, kurang optimalnya koordinasi lintas sektor yang terkait.
4. Belum Optimalnya Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, akar dari permasalahan ini adalah Kurangnya pemahaman dan partisipasi Pemerintah Daerah, Stakeholder dan masyarakat mengenai pentingnya Penyediaan Cadangan Pangan pemerintah Daerah.
5. Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat tentang Keamanan Pangan, sesuai dengan data dari Unit Pelaksana Teknis Dnas Balai Sertifikasi dan Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (BSP-PSAT) Kurangnya Kesadaran pelaku usaha Pangan Segar AsalTumbuhan (PSAT) untuk melakukan sertifikasi dan registrasi PSAT.
6. Belum Optimalnya Pengawasan Keamanan Pangan Segar dan Bermutu, sehingga masih sulitnya Seksi Keamanan Pangan dan UPTD Balai Sertifikasi dan Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (UPTD BSP-PSAT) untuk melakukan pengawasan dengan maksimal. Akar masalah dari permasalahan ini, Belum tersedianya Sarana dan Prasarana pendukung Keamanan Pangan (Laboratorium) dan Kurangnya petugas pengawas keamanan pangan yang bersertifikat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

5.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024 adalah "Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong", yang akan diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi.

Misi tersebut dikenal sebagai nawacita kedua yang merupakan percepatan, pengembangan dan pemajuan nawacita pertama. Adapun sembilan misi tersebut adalah :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden tersebut, maka Kementerian Pertanian menetapkan visi jangka menengah tahun 2020-2024 yakni: **"Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**. Kementerian Pertanian mendukung misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu: **Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing**, melalui misi Kementerian Pertanian yaitu:

1. Mewujudkan ketahanan pangan;
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia (BKP) mendukung misi Kementerian Pertanian yaitu Mewujudkan Ketahanan Pangan. Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara

sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup ditinjau dari jumlah maupun mutu. Selain itu, menjamin pangan yang aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Selaras dengan Visi dan Misi Kementerian Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan program dan kegiatan yang dialokasikan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang menitik beratkan pada program ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

Ketersediaan pangan merupakan aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Penyediaan pangan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan, selain itu sumber daya manusia juga sangat menentukan keberhasilan dari perwujudan cita-cita ketahanan pangan, dimana rendahnya kualitas sumberdaya manusia pertanian merupakan kendala yang serius dalam pembangunan pertanian, karena mereka yang berpendidikan rendah pada umumnya adalah petani yang tinggal di daerah pedesaan.

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat, dalam mendukung pembangunan ekonomi dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang menjadi misi kementerian pertanian. Maka, beberapa program pendukung yang termuat dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023 – 2026, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
2. Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan;
3. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;
4. Program penanganan kerawanan pangan;
5. Program pengawasan keamanan pangan.

5.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

a. Tujuan

Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah.

b. Sasaran

Pembangunan ketahanan pangan di Provinsi Sulawesi Barat ditujukan untuk memperkuat ketahanan pangan ditingkat mikro/rumah tangga dan individu serta ditingkat makro/daerah, sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indicator kerjanya disajikan dalam table sebagai manaberikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-			
				(5)	(6)	(7)	(8)
(1)	(2)	(3)	(4)				
	Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Indikator : Skor PPH 1 Kinerja : Meningkatnya Skor PPH	82.4	86.3	90.2	94.1
			Indikator : Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Kinerja :Meningkatnyaskor PPH Konsumsi	82.4	86.3	90.2	94.1
			Indikator : Skor PPH ketersediaan 2 Kinerja : Terpenuhinyaskor PPH Ketersedian	75	80	85	90

5.3. Program dan Kegiatan

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat, dalam mendukung pembangunan ekonomi dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang menjadi misi kementerian pertanian. Maka, beberapa program pendukung yang termuat dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023 , yaitu :

Program Utama

1. Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan;
2. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;
3. Program penanganan kerawanan pangan;
4. Program pengawasan keamanan pangan.

Program Pendukung

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

BAB IV

Rencana Kerja dan Pendanaan PD

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas PD

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target		
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan						
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1 Dokumen	Jumlah Data Neraca Bahan Makanan; Jumlah Laporan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan; dan Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Keluarga Melalui Gerakan Sayang Dalam Rumah (GERSAHARUM)	1 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	615,000,000
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi						
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	1 Laporan	Persentase Cadangan Pangan Pemerintah	20 Ton	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,500,000
Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi						
Promosi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Dokumen	Jumlah Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	1 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	125,000,000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	2 Laporan	Jumlah Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	1 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	345,000,000
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi						
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokume	Tersedianya Laporan Rekomendasi Penanganan Daerah Rawan Pangan	6 Dokume	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	124,591,000

4.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Lokasi	Plafon
-------------------	------------------	--------	--------

	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target	Kegiatan	Anggaran Sementara (Rp.)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						5,522,732,600
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						260,792,200
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokume	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD	100 Poin	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kelurahan	114,069,200
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokume	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD	100 Poin	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kelurahan	34,550,000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokume	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD	100 Poin	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kelurahan	21,800,000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokume	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD	100 Poin	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kelurahan	21,800,000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokume	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD	100 Poin	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kelurahan	3,500,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD	100 Poin	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kelurahan	65,073,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4,603,732,600
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Disediakan Gaji dan Tunjangannya Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang 0 Orang/ Bulan	Tingkat Penyerapan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Prov.Sulbar	96.44 Pers	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kelurahan	4,599,732,600
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Tingkat Penyerapan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Prov.Sulbar	96.44 Pers	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kelurahan	4,000,000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						8,000,000

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD	88 Persen	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kelurahan	8,000,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						90,262,000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	45 Paket	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38,000,000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kelurahan	42,130,000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kelurahan	10,132,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah						238,259,949
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD	100 Persen	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kelurahan	42,289,600
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD	100 Persen	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kelurahan	5,900,000
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD	100 Persen	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kelurahan	30,130,349
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	155,940,000
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokume	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,000,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						65,269,200

Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kelurahan	6,677,800
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kelurahan	58,591,400
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						82,984,850
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 Persen	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kelurahan	64,335,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 Persen	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kelurahan	18,649,850
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						173,431,801
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kelurahan	45,131,801
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kelurahan	119,300,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,000,000
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						1,452,000,000
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan						783,500,000
Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	2 Laporan	Jumlah Data Neraca Bahan Makanan; Jumlah Laporan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan; dan Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Keluarga Melalui Gerakan Sayang Halam Rumah (GERSAHARUM)	1 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95,500,000

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Laporan	Jumlah Data Neraca Bahan Makanan; Jumlah Laporan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan; dan Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Keluarga Melalui Gerakan Sayang Halam Rumah (GERSAHARUM)	1 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,000,000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	1 Dokumen	Jumlah Data Neraca Bahan Makanan; Jumlah Laporan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan; dan Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Keluarga Melalui Gerakan Sayang Halam Rumah (GERSAHARUM)	1 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28,000,000
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Dinas Ketahanan Pangan)	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1 Dokumen	Jumlah Data Neraca Bahan Makanan; Jumlah Laporan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan; dan Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Keluarga Melalui Gerakan Sayang Halam Rumah (GERSAHARUM)	1 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	615,000,000
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi						81,500,000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Dinas Ketahanan Pangan)	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	1 Laporan	Persentase Cadangan Pangan Pemerintah	20 Ton	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,500,000
Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi						587,000,000
Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Dinas Ketahanan Pangan)	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Dokumen	Jumlah Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	1 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	125,000,000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) (Dinas Ketahanan Pangan)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	2 Laporan	Jumlah Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	1 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	345,000,000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun (Dinas Ketahanan Pangan)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 Laporan	Jumlah Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	1 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	117,000,000
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi						200,000,000
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	1 Dokumen	Tersedianya Laporan Rekomendasi Penanganan Daerah Rawan Pangan	6 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,409,000

Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokume	Tersedianya Laporan Rekomendasi Penanganan Daerah Rawan Pangan	6 Dokume	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	124,591,000
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN						175,000,000
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota						175,000,000
Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Yang Dibina	1 Dokume	1. Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) di Peredaran; 2. Persentase Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang memenuhi syarat Mutu Pangan.	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,251,000
Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4 Sertifikat	1. Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) di Peredaran; 2. Persentase Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang memenuhi syarat Mutu Pangan.	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87,749,000
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu Dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	1 Dokume	1. Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) di Peredaran; 2. Persentase Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang memenuhi syarat Mutu Pangan.	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,000,000
						7,399,732,600

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2023 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026 dalam menunjang tercapainya target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023.

Rencan Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan Tahun Anggaran 2023 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran visi dan misi Provinsi Sulawesi Barat diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergi serta berkelanjutan dengan sesama OPD lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat maupun dengan OPD yang membidangi fungsi lain.

Mamuju, Agustus 2023

KEPALA DINAS,

Ir. H. ABD. WARIS BESTARI, M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19651201 199703 1 005